



Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang

RANCANGAN AWAL

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

- **TIM RENSTRA** -



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Telp. (0254) 280529 - 280530 - 281742 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG NOMOR: 550 / 09 / PHB – TU / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029;
 - b. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perlu membentuk Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2029
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten serang nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 95 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 -2031.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029;

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
 2. Kepala Bidang Angkutan Jalan
 3. Kepala Bidang Pelayaran Dan Penerbangan
 4. Kepala Bidang Keselamatan Jalan
 5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan
 7. Kepala Sub Bagian Program Dan Evaluasi
 8. Kepala Seksi Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan
 9. Kepala Seksi ASDP
 10. Kepala Seksi PJU
 11. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 12. Kepala Seksi Angkutan Jalan
 13. Kepala Seksi Terminal
 14. Kepala Seksi Keselamatan LLJ dan Perkeretaapian
 15. Kepala Seksi Parkir
 16. Fungsional Manajemen Transportasi Laut Dan Manajemen Transportasi Udara
 17. Fungsional Manajemen Lalu Lintas
 18. Fungsional Pengendalian Dan Operasional (DALOPS)
 19. Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

- a. Menyajikan Data Target Dan Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Kegiatan Periode sebelumnya;
- b. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- c. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- d. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
- e. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- f. Menentukan Strategi dan arah kebijakan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- g. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD;
- i. melaksanakan penentuan tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025 - 2029;

KEEMPAT : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua wajib memperhatikan dan mentaati ketentuan pada Undang - undang dan ketentuan lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 03 Januari 2025



BENNY YUARSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serang, sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
3. Kepala Bapperida Kabupaten Serang;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Serang.

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Serang sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan diberbagai aktivitas dan diberbagai bidang, maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 2025 - 2029 Kabupaten Serang.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi dalam kurun waktu Lima Tahun.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra ini disusun berdasarkan masukan - masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, penyusunan Rancangan Awal Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ini masih diperlukan banyak masukan – masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunan.

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERANG



BENNY YUARSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG	9
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG	9
2.1.1 Tugas Dan Fungsi	9
2.1.2 Struktur Organisasi.....	20
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG	23
2.2.1 Data Pegawai	23

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

2.2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Serang	24
2.3	KINERJA PELAYANAN.....	26
2.4	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....	30
2.4.1	Tantangan Pengembangan Pelayanan.....	30
2.4.2	Peluang Pengembangan Pelayanan.....	32
BAB III	33
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1.1	Permasalahan Di Bidang Perhubungan.....	34
3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	37
3.3	TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN	40
3.3.1	Renstra Kementerian Perhubungan	41
3.3.2	Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Banten	46
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	47
3.4.1	Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Serang.....	47
3.4.2	Implikasi Klhs Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang	51
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	52
BAB IV	53

TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	53
4.1.1 Tujuan.....	53
4.1.2 Sasaran.....	53
BAB V.....	56
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	56
4.3.1 Strategi	56
4.3.2 Kebijakan	57
BAB VI.....	60
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF PER SUB KEGIATAN.....	60
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	60
BAB VII.....	94
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
7.1. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	94
7.2. PERJANJIAN KINERJA.....	96
BAB VIII.....	105
PENUTUP	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	24
Tabel 3. Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Menurut jenis Kelamin ..	24
Tabel 4. Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.....	24
Tabel 5. Daftar Sarana Dan Prasarana	25
Tabel 6. Daftar Fasilitas Penunjang Keselamatan LLAJ	25
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026	28
Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.....	29
Tabel 9. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	36
Tabel 10. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang.....	50
Tabel 11. Indikator Sasaran pada Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang	55
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD	59
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029	83
Tabel 14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang	22
Gambar 2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD/RKPD Kabupaten Serang, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dishub Propinsi Banten.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Serang perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai **Metode** yang berhubungan dengan

kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu **Metode** untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang juga dapat digunakan sebagai :

1. Penyusunan dan penetapan rencana Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
4. Penyusunan dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK);
5. Pengelolaan data kinerja;
6. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
8. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Renstra ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terAwal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021

- tentang hasil verifikasi dan validasi pemutAwalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 -2031;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten serang nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Serang;

31. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan dokumen perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. Sebagai perencanaan Strategis yang memuat Tujuan dan Sasaran Dinas;
2. Sebagai dokumen yang berfungsi untuk memandu arah dan kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Sebagai dokumen yang dapat menjelaskan berbagai kegiatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra terdiri dari 8 (Delapan) bab dengan rincian :

Bab I

Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, diawali dengan sistematika penulisan.

Bab II

Menyajikan Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang dimana didalamnya menguraikan Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan tingkat capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III

Merupakan bab yang menguraikan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dimana didalamnya menyajikan uraian mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan Isu – Isu Strategis.

Bab IV

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Bab V

Menguraikan Strategi Dan arah Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Bab VI

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Bab VII

Merumuskan indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Perjanjian Kinerja.

Bab VIII

Merupakan Bab Penutup yang menguraikan antara lain mengenai peranan penting Renstra sebagai pedoman Dinas dan peranan stakeholders dalam tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

2.1.1 Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok :

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan; dan
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lalulintas

jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

❖ Kepala Dinas

Tugas :

memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

❖ Sekretaris

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
2. Pengaturan penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasioanal keumuman dan kepegawaian;
2. Pengaturan penyelenggaran keumuman dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
4. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keuangan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan keuangan;
2. Pengaturan penyelenggaraan keuangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
4. Pengawasan penyelenggaraan keuangan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas program dan evaluasi.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan program dan evaluasi;
2. Pengaturan penyelenggaraan program dan evaluasi;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan program dan evaluasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan program dan evaluasi;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

❖ Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas

- Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas; dan
 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas rekayasa
2. lalulintas;
3. Pengaturan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
5. Pengawasan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

- Pelaksanaan urusan Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Angkutan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di

Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional; dan

5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Angkutan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas angkutan Jalan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Terminal

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Terminal.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Terminal;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Terminal;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Terminal;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Terminal;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Pelaksanaan urusan Pengendalian dan Operasional pada Bidang Angkutan Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional

hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Keselamatan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas

Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Parkir

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Parkir.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Parkir;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Parkir;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Parkir;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Parkir;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Pelaksanaan urusan Pengujian Kendaraan Bermotor, pada Bidang Keselamatan Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta

Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
- Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
- Tugas :
- memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan.
- Fungsi :
1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
- Pelaksanaan urusan Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara pada Bidang Pelayaran dan Penerbangan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan fungsi utama di bidang perhubungan darat dan laut di daerah. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan pelayanan Jasa (by Service Organization Structure) yang merupakan pelayanan jasa pada Sektor Perhubungan. Pada dasarnya, terdapat 5 (lima) pelayanan jasa pada perhubungan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, yaitu :

1. pelayanan internal
2. pelayanan Lalu Lintas Jalan
3. Pelayanan Angkutan Jalan
4. Pelayanan Keselamatan Jalan dan
5. Pelayanan Pelayaran dan Penerbangan

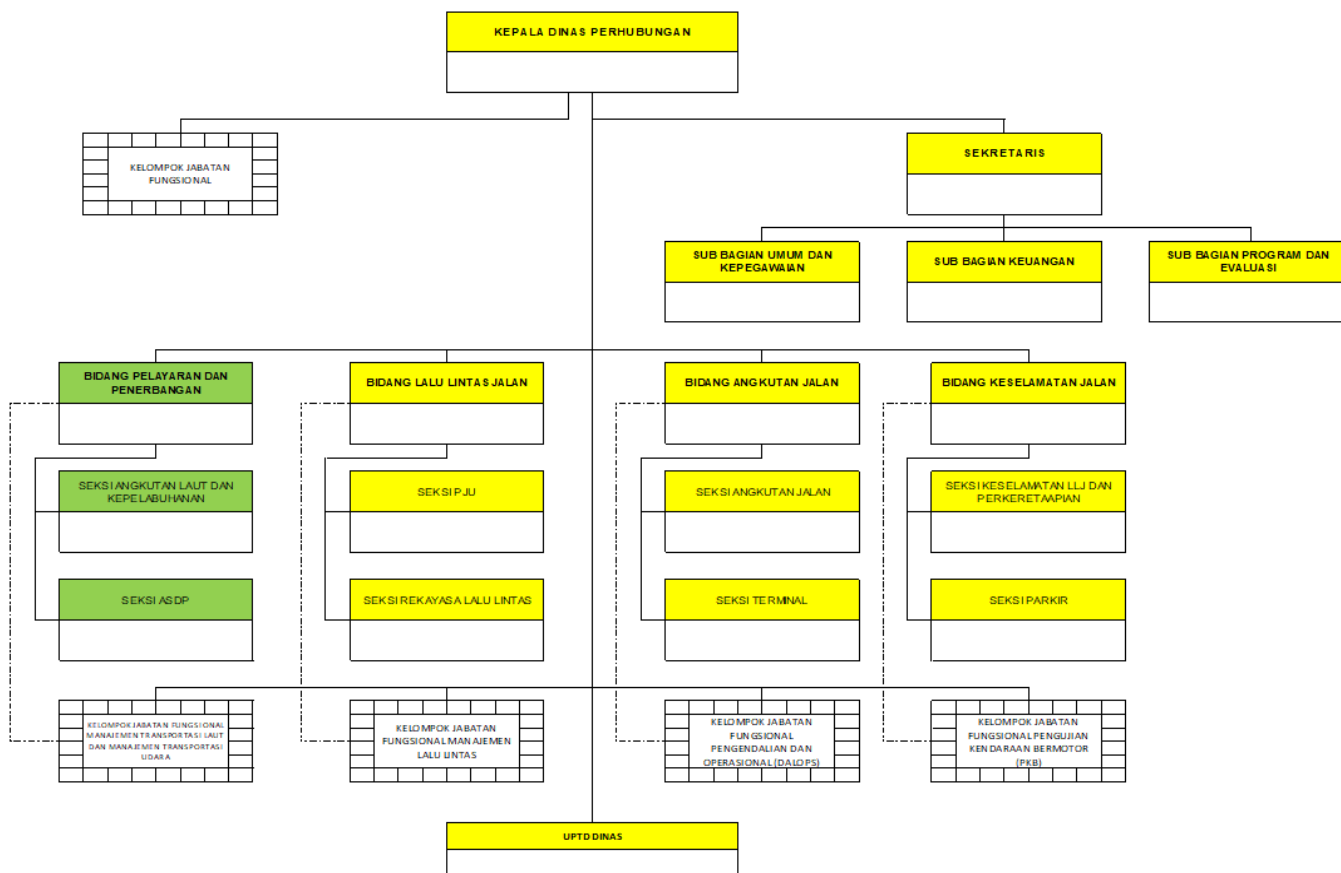
Dengan memperhatikan ke-5 pelayanan jasa tersebut struktur organisasi yang saat ini diberlakukan tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Dinas Perhubungan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalulintas;
- d. Bidang Angkutan Jalan membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Keselamatan Jalan membawahi :
 - 1. Seksi Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Parkir;
- f. Bidang Pelayaran dan Penerbangan membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

2.2.1 Data Pegawai

Sumber daya yang diidentikan dengan kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk pencapaian seluruh rencana jangka panjang di Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Faktor internal sebagai modal dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Pada saat dokumen ini dibuat, posisi jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah 312 orang dengan rincian status 67 orang PNS, 1 Orang CPNS, PPPK 4 Orang dan KKWT 240 Orang.

Secara lengkap, profil kepegawaian meliputi Jumlah, Golongan, status dan latarbelakang pendidikan kepegawaian yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut. Data Nominatif Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S-3)	
2	Pasca Sarjana (S-2)	11
3	Sarjana (S-1)	80
4	Diploma (D-3)	17
5	Diploma (D-2)	
6	Diploma (D-1)	
7	SLTA	183
8	SLTP	15
9	SD	6
	Jumlah	312

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	11
5	Fungsional	4
6	Staf/Pelaksana	291
	Jumlah	312

Tabel 3. Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Menurut jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	274
2	Perempuan	38
	Jumlah	312

Tabel 4. Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

No	Status	Jumlah
1	PNS	67
2	CPNS	1
3	PPPK	4
4	Tenaga Honorer (TKK)	0
5	Tenaga Kerja Kontrak Waktu Tertentu (KKWT)	240
	Jumlah	312

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pelayanan berjalan dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang senantiasa berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Sarana Dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume
1	Gedung Kantor :	
	- Kantor utama	2.200 m2
	- Kantor PKB	9.949 m2
	- Terminal Tanara	5000 m2
	- Terminal Cikande Permai	1000 m2
	- Terminal Anyer	1.000 m2
	- Terminal Tunjung Teja	3000 m2
	- Kantor ASDP	672,73 m2
	- Tower Gunung Karang	200 m2
2	Kendaraan Dinas :	
	- Roda 4	30 Unit
	- Roda 2	56 Unit
3	Kapal Patroli	3 Unit
4	Halte	21 Unit
5	Angkutan Perintis	6 Unit
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor :	
	- Komputer /PC	67 Unit
	- Laptop	31 Unit
	- Printer	50 Unit
	- Meja	83 Buah
	- Kursi	250 Buah

Tabel 6. Daftar Fasilitas Penunjang Keselamatan LLAJ

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Terpasang
1	APPIL	
	- Warning Light	15 Unit
2	Rambu Rambu Lalu Lintas	
	- Rambu Standar	671 Buah
	- Rambu RPPJ	210 Buah
3	Marka Jalan	
	- Garis Solid dan Garis Putus	222.812 m'
	- Zebra Cross	37 Unit
4	Guard Rail	1.864 m'
5	Delineator	1.170 Unit
6	Cermin Tikungan	22 Unit
7	Penerangan Jalan Umum (PJU)	8.586 Titik

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya (tahun 2021-2026), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kabupaten Serang. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 telah disusun Indikator Kinerja Utama/IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil capaian indikator kinerja sesuai Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						REALISASI / CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	4						5				6		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah																
1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah			96,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Kinerja Utama yaitu Cakupan aksesibilitas antar wilayah dengan target 100% realisasi 100% sehingga Presentase capaian kinerja 100% . Sesuai dengan target yang direncanakan

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	35.186.129.156	25.515.353.712	27.228.952.761	24.073.183.749	31.830.711.430	31.642.868.941	24.502.868.916	25.787.322.409	23.723.353.331	3.373.278.332	90	96	95	99	11	-2%	-43%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	18.693.234.114	14.836.813.206	13.844.273.635	13.913.146.258	14.283.804.968	15.733.247.313	14.032.210.998	12.944.873.413	13.420.463.398	2.796.891.879	84	95	94	96	20	-7%	-35%

Catatan : Realisasi pada tahun Ke 5 Realisasi pada Triwulan I

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Serang yang semakin berkembang, khususnya pengembangan di bidang transportasi yang membutuhkan peningkatan pelayanan, hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang maupun bagi stake holder lainnya.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diwilayah Kabupaten serang guna mendukung pergerakan Transportasi di wilayah Kabupaten serang
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
3. Kemacetan lalu lintas yang menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kabupaten serang yang berkembang dan merupakan Wilayah industri sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pengawasan, Pengendalian dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
5. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan, pembinaan dan penertiban yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya peningkatan pelayanan perparkiran. Selain itu perlu adanya upaya penataan Kawasan perparkiran, seperti penataan dan pembangunan Fasilitas Perparkiran.
6. Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali jaringan trayek diwilayah kabupaten serang.
7. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.
8. Pengembangan pelabuhan lokal sehingga dapat dijadikan salah satu pelabuhan alternatif penghubung pulau pulau terluar diwilayah kabupaten serang.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimana posisi Dinas Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas, Penataan dan Manajemen Perparkiran serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah.
2. Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Adanya potensi Pelayanan Publik seperti Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), kepelabuhanan, Keterminalan dan Perparkiran.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk dalam Daerah sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Di masa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya.

Pada bagian perumusan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

3.1.1 Permasalahan Di Bidang Perhubungan

Adapun permasalahan Transportasi secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
2. Penyediaan perlengkapan jalan belum menjangkau seluruh kawasan prioritas yang wajib dipasangkan.
3. Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dimana Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan Pengujian sehingga diperlukan Perawatan/peremajaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
5. Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal. faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal pada setiap kecamatan.
6. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpulan Lokal.

7. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai danau dan Penyebrangan sebagai salah satu angkutan umum sungai dan Penyebrangan diwilayah Kabupaten Serang.
8. Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi, serta berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan jumlah angkutan umum di Kabupaten Serang semakin berkurang, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari permasalahan angkutan perdesaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
9. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Serang sehingga mengakibatkan kemacetan Arus lalin terutama pada persimpangan dan pada jam jam sibuk.
10. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
11. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

Dengan memperhatikan permasalahan bidang perhubungan, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam melaksanakan, merencanakan, mengatur, dan mengawasi

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kabupaten Serang dapat dirumuskan sebagai mana tabel Berikut ini :

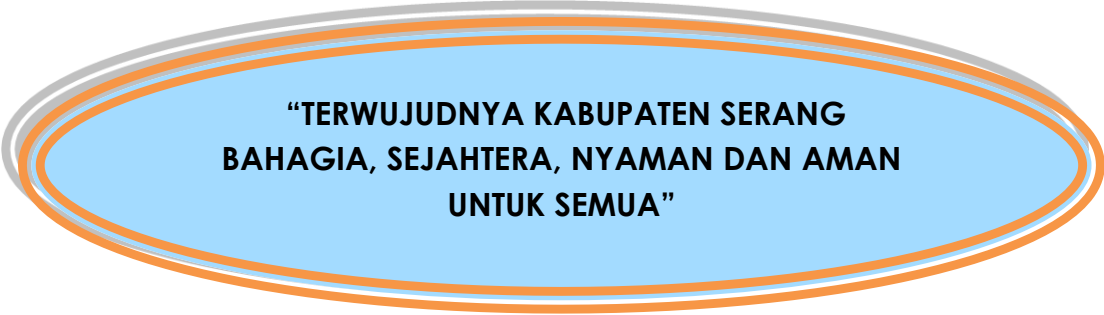
Tabel 9. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Infrastruktur Transportasi masih belum optimal	1.1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	1.1.1 Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.2 Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.3 Minimnya Transportasi Publik dan Jasa Angkutan Barang 1.1.4 Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor. 1.1.5 Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran. 1.1.6 Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal dan ASDP
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas 2.1.2 Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan 2.1.3 Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal 2.1.4 Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.1.5 berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan good governance salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (strategic vision) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan .

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2025 - 2029, bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 adalah :



**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG
BAHAGIA, SEJAHTERA, NYAMAN DAN AMAN
UNTUK SEMUA”**

Uraian makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAHAGIA :

Bahagia merupakan perwujudan dari terpenuhinya kondisi Sejahtera dan Nyaman dalam masyarakat.

SEJAHTERA :

Adapun kondisi Sejahtera yang ingin dicapai meliputi:

1. Sejahtera Finansial
2. Sejahtera Mental
3. Sejahtera Kesehatan
4. Sejahtera Spiritual.

NYAMAN DAN AMAN UNTUK SEMUA :

Sedangkan kondisi Nyaman yang ingin diciptakan adalah:

1. Nyaman sebagai Kabupaten hunian
2. Nyaman sebagai Kabupaten kreatif
3. Nyaman sebagai Kabupaten Pendidikan
4. Nyaman sebagai Kabupaten Industri

Beritik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 maka misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kabupaten yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;

5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kabupaten yang berkeadilan dan inklusif;
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati;

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2025 - 2029 diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Serang selaku pengelola kebijakan dibidang perhubungan, mendukung, mempercepat dan bersinergi dengan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang terutama mempercepat dan mendorong pada misi 3 yaitu :

Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kabupaten yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan

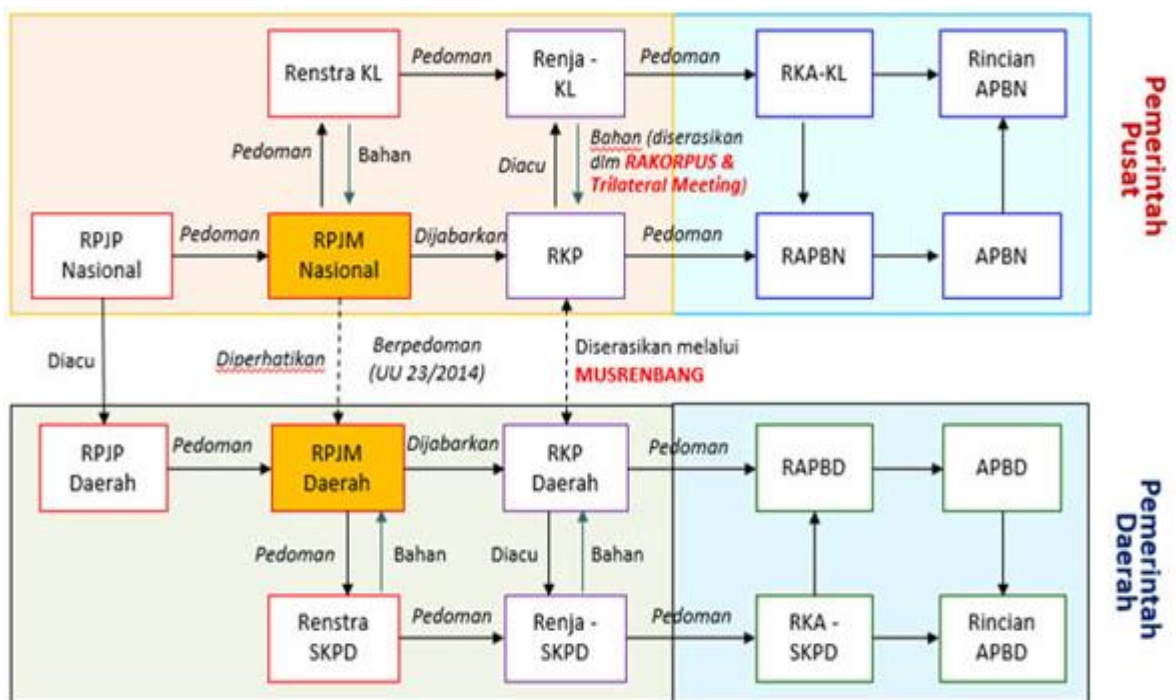
Keterlibatan secara langsung Dinas Perhubungan hal ini diuraikan pada **tujuan** dan **sasaran** pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 pada **Tujuan Misi 3 Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh** dengan **Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya.**

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan untuk ketersediaan sarana, prasarana dan Fasilitas perhubungan Darat dan Laut. Adapun fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang yang terkait dengan misi tersebut yaitu : Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Melaksanakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN

Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Bersinergi dengan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra SKPD Propinsi Banten (Dinas Perhubungan Provinsi Banten). Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah :



Gambar 2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

3.3.1 Renstra Kementerian Perhubungan

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Uraian makna yang terkandung dalam Visi adalah :

1. **Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah

lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Misi dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai Berikut:

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara

bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembinaan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kabupaten Serang.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan serta jenis dan mekanisme transportasi di Kabupaten Serang. yang perlu menjadi perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Wilayah Kabupaten Serang.

3.3.2 Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Banten

Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan dan Sasaran yaitu :

Tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan cara :

1. Mendidik dan menyiapkan aparat Dinas Perhubungan Provinsi Banten semakin handal;
2. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Dengan sasaran meningkatnya aparatur perhubungan yang profesional dan handal.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah dengan cara :

1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali;
2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Dengan sasaran :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;
2. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten;
3. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
4. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan SDM di Bidang Perhubungan.
2. Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas.
3. Peningkatan pelayanan transportasi.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PKL dan pusat pusat lainnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Serang meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;
- b. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
- c. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
- d. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.

Sedangkan pusat-pusat lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Serang.

Secara umum penataan ruang wilayah Kabupaten Serang sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
- b. Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;
- c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
- d. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- e. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
- f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
- j. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
- k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu Kabupaten Serang juga melakukan perencanaan mengenai sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Anyar, Kecamatan Tunjungteja, Kecamatan Petir dan Kecamatan Pamarayan
- b. Rencana terminal agropolitan di Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Baros
- c. Rencana Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo
- d. Rencana pengembangan stasiun kereta api meliputi:
 1. Pembangunan stasiun kereta api terpadu pada Kawasan Bojonegara di Kecamatan Pulo Ampel;
 2. Pembangunan stasiun kereta api baru Cikande di Kecamatan Cikande; dan
 3. Pengembangan dan Peningkatan fungsi stasiun, meliputi:
 - Stasiun Catang di Kecamatan Tunjungteja;
 - Stasiun Jambu Baru di Kecamatan Tunjungteja;
 - Stasiun Anyar Kidul di Kecamatan Anyar; dan
 - Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.
- e. Rencana pembangunan sungai dan Danau sebagai Pelabuhan pengumpan meliputi:
 - Pelabuhan Pontang;
 - Pelabuhan Carenang;
 - Pelabuhan Kragilan;
 - Pelabuhan Cikande; dan
 - Pelabuhan Tirtayasa
- f. Pengembangan dermaga penyeberangan lokal, meliputi:
 - Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara
 - Dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel
 - Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa
 - Dermaga Lontar di Kecamatan Tirtayasa

g. Pelabuhan Pengumpulan lokal berupa Pembangunan Pelabuhan baru meliputi:

- Pelabuhan Grenyang-Pulo Ampel;
- Pelabuhan Pasauran;
- Pelabuhan Pulo Panjang – Pulo Ampel;
- Pelabuhan Terate;
- Pelabuhan Pulo Tunda Tirtayasa; dan
- Pelabuhan Lontar - Pontang.

Hasil telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;	Prasarana dan sarana transportasi kabupaten belum terkoneksi secara optimal	-	Dibutuhkan pemantapan dan pengembangan Prasarana dan sarana transportasi meliputi: 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diwilayah Kabupaten serang guna mendukung pergerakan Transportasi di wilayah Kabupaten serang	Wilayah Kabupaten Serang

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
				2. Mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang. 3. Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang 4. Penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpulan Lokal dan ASDP	Kec. Pontang, Kec. Cikande, Kec. Tunjung Teja, Kec. Anyer, Kec. Pamarayan Dan Kec. Cinangka terminal agropolitan di Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Baros; dan Rencana Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo Pulo Tunda, Pulo Panjang, Grenyang dan Lontar

3.4.2 Implikasi Klhs Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yaitu tetap mengacu kepada pengaturan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang yaitu terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan cara :

- Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang.;

- Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar
- penanganan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh

Dinas Perhubungan melakukan program dan kegiatan yang dapat mendukung Rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu pada rekomendasi KLHS terkait uji kendaraan secara berkala, rekayasa lalu lintas, optimasi angkutan umum, peningkatan mutu angkutan perdesaan, penambahan moda transportasi, sosialisasi berkala mengenai angkutan umum, peningkatan kendaraan umum perdesaan, dan peraturan perhubungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Mencermati isu-isu Strategis di bidang transportasi yang sedang mengemuka berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Serang selama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Peningkatan SDM di Bidang Perhubungan
- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Transportasi
- Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana jalan
- Peningkatan mobilitas penduduk diwilayah Kabupaten Serang
- Peningkatan manajemen kebutuhan lalu-lintas
- Peningkatan keselamatan berlalu-lintas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Serang serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Banten, Telaahaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Serang sebagaimana dituangkan pada Bab III, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk periode tahun 2025 - 2029.

Rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh”

4.1.2 Sasaran

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh”, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Indikator Sasaran pada Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel Berikut ini :

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tabel 11. Indikator Sasaran pada Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Rasio Konektivitas	%	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	Nilai	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
			- Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	38	39	44	48	53
		Program Pengelolaan Pelayaran	- Konektivitas Laut	%	75	75	75	75	75
		Program Pengelolaan Penerbangan	- Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Yang Memiliki Izin	%	25	50	50	50	50
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	- Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	%	88	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	BB	BB	A	A	A
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan tata kelola Perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi pembangunan sektor transportasi merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Strategi pembangunan sektor transportasi dirumuskan dengan memperhatikan lingkungan stratejik yang berpengaruh seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan mata transportasi, sumber daya aparatur dan dukungan dari stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan dan pengembangan urusan transportasi di wilayah Kabupaten Serang.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan
2. Meningkatkan Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU) di Wilayah Kabupaten Serang
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana LLAJ

4. Meningkatkan angkutan umum yang laik jalan
5. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Arus Lalin di persimpangan
6. Meningkatkan fungsi Sarana dan Prasarana pelabuhan pengumpan Lokal dan Penyebrangan
7. Meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas
8. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan

Strategi cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam program program, antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).
3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN.
5. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN.

4.3.2 Kebijakan

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2025-2029 yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi

merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mewujudkan Visi Kabupaten serang yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA, SEJAHTERA, NYAMAN DAN AMAN UNTUK SEMUA”**, Dinas Perhubungan kabupaten serang menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke- 3 yaitu **“Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kabupaten yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan”** Tujuan yang mendukung misi tersebut adalah **Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh** dengan sasaran yaitu **Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya**. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA, SEJAHTERA, NYAMAN DAN AMAN UNTUK SEMUA			
MISI 3 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kabupaten yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Meningkatkan Kinerja infrastruktur transportasi dan konektivitas antar wilayah guna mendukung Pengembangan pariwisata dan pemajuan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan - Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ - Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum - Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Penyebrangan dan kepelabuhanan - Meningkatkan Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU) di Wilayah Kabupaten Serang - Meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas - Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja dan tata kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas dan akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran - Meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Keuangan - Meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian - Meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Umum - Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF PER SUB KEGIATAN****5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Juga mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kabupaten Serang.

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2025 - 2029 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 sebanyak 5 Program Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 3) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Sub Kegiatan Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan
- Sub Kegiatan Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- Sub Kegiatan Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
- Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
- Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

- 7) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
 - Sub Kegiatan Penetapan Dokumen Teknis Andalalin
- 8) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 9) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

- Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 15) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota
- 16) Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- 9) Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta

Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 11) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- 12) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
- 13) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 14) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 15) Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
- 16) Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 17) Kegiatan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 18) Kegiatan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 19) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
4. Program Pengelolaan Penerbangan yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
 - 2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
5. Program Pengelolaan Perkeretaapian yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Jalurnya Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7) Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur

- Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029								
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
			2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
			2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	10.231.273.000	12	Bulan	11.497.746.750	12	Bulan	11.497.746.750	12	Bulan	11.497.746.750	12	Bulan	67.720.006.750						
			2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dokumen	135.328.200	2	Dokumen	250.000.000	2	Dokumen	250.000.000	2	Dokumen	350.000.000	2	Dokumen	350.000.000	12	Dokumen	1.685.328.200			
			2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			Laporan			Laporan	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	3	Laporan	60.000.000	
			2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	6.099.840	3	Laporan	10.000.000	3	Laporan	30.000.000	3	Laporan	50.000.000	3	Laporan	50.000.000	3	Laporan	50.000.000	18	Laporan	196.099.840
			2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan			Laporan			Laporan	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	3	Dokumen	30.000.000	
			2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
			2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	263.996.400	12	Dokumen	243.709.056	12	Dokumen	350.000.000	12	Dokumen	450.000.000	12	Dokumen	450.000.000	12	Dokumen	450.000.000	72	Dokumen	2.207.705.456
			2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			Laporan			Laporan	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	3	Laporan	30.000.000	
			2.15.01.2.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
			2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen			Dokumen			Dokumen	1	Dokumen	100.000.000		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000	
			2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	500	%							
			2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		1	Paket	200.000.000	2	Paket	400.000.000	2	Paket	400.000.000	2	Paket	400.000.000	2	Paket	400.000.000	9	Paket	1.800.000.000
			2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		312	Orang	300.000.000	312	Orang	300.000.000	312	Orang	300.000.000	312	Orang	300.000.000	312	Orang	300.000.000	1.560	Orang	1.500.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029								
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
			2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
			2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	1	Paket	40.000.000	1	Paket	40.000.000	1	Paket	50.000.000	1	Paket	50.000.000	6	Paket	260.000.000			
			2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			Paket	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	4	Paket	400.000.000				
			2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			Paket	1	Paket	30.000.000	1	Paket	30.000.000	1	Paket	30.000.000	3	Paket	90.000.000				
			2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	176.961.357	1	Paket	200.000.000	1	Paket	300.000.000	1	Paket	400.000.000	1	Paket	450.000.000	6	Paket	2.026.961.357			
			2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	141.416.541	1	Paket	150.000.000	1	Paket	250.000.000	1	Paket	300.000.000	1	Paket	350.000.000	6	Paket	1.591.416.541			
			2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen			Dokumen	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen	30.000.000	2	Dokumen	30.000.000	8	Dokumen	120.000.000	
			2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan			Laporan	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	50.000.000	48	Laporan	200.000.000	
			2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	436.952.412	150	Laporan	600.000.000	150	Laporan	700.000.000	150	Laporan	1.210.000.000	150	Laporan	1.210.000.000	150	Laporan	1.210.000.000	900	Laporan	5.366.952.412
			2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100	%			100	%			100	%			100	%			100	%	600	%	
			2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit			1	Unit	1.004.760.000		Unit			Unit			Unit		1	Unit	1.004.760.000		
			2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit			Unit			5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	5	Unit	50.000.000	15	Unit	150.000.000		
			2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	48.772.000	11	Unit	78.728.000	16	Unit	250.000.000	16	Unit	300.000.000	16	Unit	350.000.000	16	Unit	400.000.000	77	Unit	1.427.500.000
			2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			Unit	6	Unit	507.700.000	6	Unit	520.700.000	6	Unit	550.070.000	6	Unit	570.170.000	24	Unit	2.148.640.000	
			2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%			100	%			100	%			100	%			100	%	600	%	
			2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	181.617.300	12	Laporan	167.661.792	12	Laporan	200.000.000	12	Laporan	250.000.000	12	Laporan	250.000.000	12	Laporan	250.000.000	72	Laporan	1.299.279.092
			2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	528.183.296	12	Laporan	550.113.188	12	Laporan	740.000.000	12	Laporan	940.000.000	12	Laporan	940.000.000	12	Laporan	940.000.000	72	Laporan	4.638.296.484

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029								
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
			2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan		Laporan		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	36 Laporan	300.000.000							
			2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211.888.750	12 Laporan	167.661.792	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	72 Laporan	1.329.550.542							
			2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %								
			2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Bulan	255.117.550	21 Unit	300.000.000	21 Unit	607.426.560	21 Unit	807.426.560	21 Unit	807.426.560	21 Unit	807.426.560	126 Unit	3.584.823.790							
			2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	63 Bulan	659.411.400	63 Unit	700.000.000	63 Unit	1.501.450.840	63 Unit	1.701.450.840	63 Unit	1.701.450.840	63 Unit	1.956.450.840	378 Unit	8.220.214.760							
			2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit		Unit		10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	30 Unit	300.000.000							
			2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		200 Unit	59.952.000	200 Unit	100.000.000	200 Unit	100.000.000	200 Unit	100.000.000	200 Unit	100.000.000	1.000 Unit	459.952.000							
			2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	409.483.916	5 Unit	500.000.000	5 Unit	1.252.550.840	5 Unit	1.460.550.840	5 Unit	1.460.550.840	5 Unit	1.460.550.840	30 Unit	6.543.687.276							
			2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit		Unit		50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	150 Unit	150.000.000							
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Rasio Konektivitas	2.15.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	0,16	Nilai V/C Ratio	20.306.315.559	13	Nilai V/C Ratio	38.605.641.068	14	Nilai V/C Ratio	55.145.717.266	14	Nilai V/C Ratio	58.552.256.600	14	Nilai V/C Ratio	62.636.306.429	14	Nilai V/C Ratio	66.394.484.815	69	Nilai V/C Ratio	301.640.721.737
			2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %								
			2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	450.000.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		1 Dokumen	450.000.000							
			2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	450.000.000							
			2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	205.000.000							

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029							
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %							
			2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		Unit	3	600.000.000	Unit	5	500.000.000	Unit	5	500.000.000	Unit	5	500.000.000	18	2.100.000.000				
			2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	230	4.373.954.900	450	13.341.081.000	550	15.000.000.000	550	15.000.000.000	550	16.000.000.000	550	17.000.000.000	2.880	Unit	80.715.035.900					
			2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Unit	21	665.080.000	Unit	24	680.080.000	Unit	29	695.080.000	Unit	34	710.080.000	Unit	108	2.750.320.000			
			2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000	11.143.096.714	1000	15.000.000.000	1000	15.000.000.000	1000	16.000.000.000	1000	17.000.000.000	1000	18.000.000.000	6.000	Unit	92.143.096.714					
			2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %							
			2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen		1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	200.000.000	Dokumen		Dokumen		2	Dokumen	300.000.000					
			2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		Unit	1	Lahan Terminal Barang (2 HA)	10.000.000.000	1	Unit Terminal Barang	10.000.000.000	2	Lahan Terminal Tipe C	10.560.324.029	2	Unit Terminal Tipe C	11.174.733.615	6	Unit	41.735.057.644		
			2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit		Unit	1	Unit	250.000.000	1	Unit	300.000.000	1	Unit	350.000.000	1	Unit	400.000.000	4	Unit	1.300.000.000		
			2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	443.873.700	4	Unit	750.000.000	4	Unit	1.058.450.000	4	Unit	1.158.450.000	4	Unit	1.258.450.000	4	Unit	1.358.450.000	24	Unit	6.027.673.700
			2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya																				
			2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %					
			2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Dokumen			2	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	50.000.000	8	Dokumen	200.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	158.208.650	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	650.000.000	72 Laporan	2.508.208.650
			2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %	
			2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia	Unit		Unit		Unit		1 Unit	400.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	900.000.000	3 Unit	2.000.000.000
			2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga penguji yang tersedia	Orang		Orang		Orang		1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	3 Orang	300.000.000
			2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000 Unit	199.291.382	10000 Unit	250.000.000	10000 Unit	275.000.000	10000 Unit	300.000.000	10000 Unit	325.000.000	10000 Unit	350.000.000	60000 Unit	1.699.291.382
			2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000 Dokumen	434.934.382	10000 Dokumen	500.000.000	10000 Dokumen	525.000.000	10000 Dokumen	550.000.000	10000 Dokumen	575.000.000	10000 Dokumen	600.000.000	60000 Dokumen	3.184.934.382
			2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Laporan		Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000
			2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan		Laporan		Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000
			2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	302.848.850	9 Unit	600.000.000	9 Unit	700.000.000	9 Unit	725.000.000	9 Unit	750.000.000	9 Unit	800.000.000	54 Unit	3.877.848.850
			2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Laporan		Laporan		12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	36 Laporan	360.000.000
			2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		1 Laporan	200.000.000	Laporan		1 Laporan	200.000.000
			2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Laporan		Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000
			2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		20 Kegiatan	
			2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	815.000.000	12 Laporan	1.495.326.300	12 Laporan	1.565.326.300	12 Laporan	1.615.326.300	12 Laporan	1.665.326.300	12 Laporan	1.725.326.300	72 Laporan	8.881.631.500

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2029		
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			2.15.02.2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Unit	1.331.085.349	5 Unit	3.661.300.632	5 Unit	6.187.998.726	5 Unit	6.250.000.000	5 Unit	6.500.000.000	5 Unit	6.750.000.000	30 Unit	30.680.384.707
			2.15.02.2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2.15.02.2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	20 Laporan	250.000.000
			2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejadian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %	
			2.15.02.2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2.15.02.2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	Orang	-	Orang	-	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	2 Orang	40.000.000	6 Orang	120.000.000
			2.15.02.2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	15 Rekomenda	150.000.000
			2.15.02.2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	72 Laporan	282.000.000
			2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %	
			2.15.02.2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	Orang	-	Orang	-	1 Orang	20.000.000	1 Orang	20.000.000	1 Orang	20.000.000	3 Orang	60.000.000
			2.15.02.2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11 Laporan	106.858.650	11 Laporan	158.040.000	11 Laporan	170.000.000	11 Laporan	189.648.000	11 Laporan	227.577.000	11 Laporan	273.093.000	66 Laporan	1.125.216.650
			2.15.02.2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	- Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	99.792.000	1 Laporan	119.750.000	1 Laporan	143.700.000	3 Laporan	363.242.000
			2.15.02.2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	418.296.000	1 Laporan	501.955.000	1 Laporan	602.346.000	3 Laporan	1.522.597.000
			2.15.02.2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	- Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	418.296.000	1 Laporan	501.955.000	1 Laporan	602.346.000	3 Laporan	1.522.597.000

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	348	Unit	4.171.724.980
			2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	66	Laporan	7.390.643.482
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Kegiatan	
			2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	900.000.000
			2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	1326	rekomendasi	619.217.196
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	%	-	%	-	%	100	%	100	%	100	%	300	%	

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2029	
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
			2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000
			2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan		Laporan		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	75 %	1.490.893.464	75 %	1.578.859.000	75 %	2.498.859.000	75 %	3.258.859.000	75 %	5.700.339.000	75 %	8.655.859.000	450 %	23.183.668.464
			2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %	
			2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	128.358.650	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	170.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	220.000.000	12 Dokumen	250.000.000	72 Dokumen	1.118.358.650
			2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		600 %	
			2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	200.000.000
			2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	100.000.000	Dokumen		1 Dokumen	100.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029										
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
			2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	Laporan	418.006.100	12	Laporan	428.859.000	12	Laporan	628.859.000	12	Laporan	628.859.000	12	Laporan	628.859.000	12	Laporan	628.859.000	72	Laporan	3.362.301.100		
			2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%			
			2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Dokumen			Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000		
			2.15.03.2.11.03	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Dokumen			Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000		
			2.15.03.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	12	Laporan	388.852.314	12	Laporan	400.000.000	12	Laporan	500.000.000	12	Laporan	630.000.000	12	Laporan	650.000.000	12	Laporan	675.000.000	72	Laporan	3.243.852.314		
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Pemberbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan, pemberbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%			
			2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun									1	Dokumen	100.000.000		1	Lahan Pelabuhan	2.501.480.000		1	Unit	5.552.000.000	1	Unit	8.153.480.000	
			2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		Unit			Unit		3	Unit	600.000.000	3	Unit	600.000.000	3	Unit	600.000.000	3	Unit	600.000.000	12	Unit	2.400.000.000		
			2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	Laporan	555.676.400	2	Laporan	600.000.000	2	Laporan	600.000.000	2	Laporan	700.000.000	2	Laporan	800.000.000	2	Laporan	850.000.000	12	Unit	4.105.676.400		
			2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		Unit			Unit			Unit		3	Unit	100.000.000		3	Unit	100.000.000		3	Unit	100.000.000	9	Unit	300.000.000

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029						
						2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	%	-	%	-	%	100	%	100	%	100	%	300	%							
			2.15.03.2.13.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					Unit		1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	300.000.000			
			2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter yang memiliki Izin	25	%	27625000	25	%	50.000.000	50	%	100.000.000	50	%	100.000.000	50	%	100.000.000	50	%	100.000.000	250	%	477.625.000
			2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	5	Kegiatan		
			2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang diterbitkan	1	Dokumen	27.625.000	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	6	Dokumen	477.625.000
			2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	88	%	2.248.349.726	88	%	2.248.349.726	100	%	2.248.349.726	100	%	2.898.349.726	100	%	2.248.349.726	100	%	2.248.349.726	576	%	14.140.098.356
			2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	
			2.15.05.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	550.000.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	550.000.000
			2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		6	Kegiatan	
			2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Helikopter Batas Daerah	12	Laporan	2.248.349.726	12	Laporan	2.248.349.726	12	Laporan	2.248.349.726	12	Laporan	2.248.349.726	12	Laporan	2.248.349.726	12	Laporan	2.248.349.726	72	Laporan	13.490.098.356
			2.15.05.2.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	
			2.15.05.2.06.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Rasio Konektivitas	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19
Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TARGET KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas heliport yang memiliki izin	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	

7.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja memuat Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, Eselon II dengan Eselon III dan Eselon III dengan Eselon IV serta Target Indikator Kinerja yang ingin dicapai dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) = IKI KEPALA DINAS

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Rasio Konektivitas	44,60	44,60	44,60	44,60	44,60
2	Nilai SAKIP PD	BB	BB	A	A	A

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKERTARIS

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan tata kelola Perangkat daerah	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	90	91	92	93	94

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12	12	12	12
2	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1	1
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			1		
4	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2	2	2	2
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	312	312	312	312	312
6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1
7	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1	1	1
8	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	1	1
9	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1
10	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	1
11	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	2	2
12	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12	12	12	12
13	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1				
14	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan			5	5	5
15	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	16	16	16	16
16	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6	6	6	6
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	12	12
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12
21	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	21	21	21	21
22	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	63	63	63	63
23	Jumlah Mebel yang Dipelihara			10	10	10
24	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	200	200	200	200
25	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5	5	5	5
26	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50	50	50

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	4
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	1
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	3
8	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1
9	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1
10	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	1	1

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN KEUANGAN

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	12	12	12	12
2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	2	2	2
3	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	150	150	150

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG LALU LINTAS JALAN

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	38	39	44	48	53

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI REKAYASA LALU LINTAS

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		5	5	5	5
2	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		21	24	29	34
3	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5	5	5	5	5

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450	550	550	550	550
2	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000	1000	1000	1000	1000

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1				
2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ		1	1	1	1
3	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1	1	1
5	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4
6	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan			1	1	1
7	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya			2	2	2
8	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			5	5	5
9	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12	12	12	12	12

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG ANGKUTAN JALAN

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase terlaksananya Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan	100	100	100	100	100
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI TERMINAL

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1			
2	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		1 Lahan Terminal Barang (2 HA)	1 Unit Terminal Barang	2 Lahan Terminal Tipe C	2 Unit Terminal Tipe C
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1	1	1	1
4	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	4	4	4	4

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI ANGKUTAN JALAN

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	58	58	58	58	58
2	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1	1
3	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	221	221	221	221	221
4	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1
5	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1
6	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
01	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12
02	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11	11	11	11	11

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG KESELAMATAN JALAN

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	96	97	98	99	100
2	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	100	100	100	100
3	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	88	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia			1	1	1
2	Jumlah tenaga penguji yang tersedia			1	1	1
3	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000	10000	10000	10000	10000
4	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000	10000	10000	10000	10000
5	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1	1	1
6	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			1	1	1
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	9	9	9	9
8	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			12	12	12
9	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1	
10	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1	1	1

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI SEKSI KESELAMATAN LLJ DAN PERKERETAAPIAN

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1	1	1
2	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11	11	11	11	11
3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		1	1	1	1
4	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			1	1	1
5	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			1	1	1
6	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			1		
7	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	12	12	12	12	12
8	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota			1		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PARKIR

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2	2	2	2
2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG PELAYARAN DAN PENERBANGAN

No	Indikator Kinerja	Target tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Konektivitas Laut	75	75	75	75	75
2	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	25	50	50	50	50

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI ASDP

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12
2	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			1		
3	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1	
4	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	12	12	12	12	12
5	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			1	1	1

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			1		
2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1	
3	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	12	12	12	12
4	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun			1 Dokumen	1 lahan	1 Unit
5	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		3	3	3	3
6	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	12	12	12	12
7	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia			3	3	3

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA

No	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 2025 - 2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Renja) Tahun 2025 s/d 2029 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 s/d 2029.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 s/d 2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 s/d 2029 khususnya sektor perhubungan.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 - 2029

5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029, masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Renja) Tahun 2025 s/d 2029.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang lebih baik.

Serang, Mei 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERANG



BENNY YUARSA, ATD, M.Si

NIP. 19670909 199103 1 005

LAMPIRAN

Tabel Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029				
									Target		Target		Target		Target		Target		Target				Target
			2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Keuangan perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
			2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	12	Dokumen
			2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	18	Laporan
			2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Dokumen
			2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	72	Dokumen
			2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	01	2.04		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029				
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target				
									Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		
			2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah		%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	500	%			
			2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	1	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	9	Paket		
			2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	312	Orang	312	Orang	312	Orang	312	Orang	312	Orang	1.560	Orang		
			2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%			
			2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket	
			2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	4	Paket		
			2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	3	Paket		
			2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket	
			2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket	
			2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen
			2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	48	Laporan
			2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	900	Laporan
			2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	1	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	1	Unit		
			2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	15	Unit

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029				
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
			2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	11	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	77	Unit
			2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	24	Unit
			2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan
			2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan
			2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	36	Laporan
			2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan
			2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Bulan	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	126	Unit
			2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Bulan	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	378	Unit
			2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	30	Unit
			2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	1.000	Unit

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	30	Unit
			2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		Unit	50	Unit	50	Unit	50	Unit	150	Unit
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Rasio Konektivitas	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	0,16	Nilai V/C Ratio	0,17	Nilai V/C Ratio	0,17	Nilai V/C Ratio	0,18	Nilai V/C Ratio	0,19	Nilai V/C Ratio	0,19	Nilai V/C Ratio	1,06	Nilai V/C Ratio
								Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
			2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen
			2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen
			2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	5	Laporan
			2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		Unit		Unit	3	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	18	Unit
			2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	230	Unit	450	Unit	550	Unit	550	Unit	550	Unit	550	Unit	2.880	Unit
			2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Unit		Unit	21	Unit	24	Unit	29	Unit	34	Unit	108	Unit
			2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000	Unit	1000	Unit	1000	Unit	1000	Unit	1000	Unit	1000	Unit	6.000	Unit

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target		Target		Target		Target		Target		Target				
			2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen
			2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		Unit		Unit	1	Lahan Terminal Barang (2 HA)	1	Unit Terminal Barang	2	Lahan Terminal Tipe C	2	Unit Terminal Tipe C	6	Unit
			2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	4	Unit
			2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	24	Unit
			2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
			2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen
			2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
			2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia		Unit		Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	3	Unit
			2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga penguji yang tersedia		Orang		Orang		Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	3	Orang
			2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000	Unit	10000	Unit	10000	Unit	10000	Unit	10000	Unit	10000	Unit	60000	Unit
			2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	60000	Dokumen
			2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	54	Unit
			2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		Laporan		Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	36	Laporan
			2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
			2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	20	Kegiatan
			2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029			
									2024		2025		2026		2027		2028		2029	
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
			2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30 Unit			
			2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen			
			2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20 Laporan			
			2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %			
			2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen			
			2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang			
			2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Laporan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Rekomendasi			
			2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72 Laporan			
			2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %			
			2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang			
			2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	66 Laporan			
			2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	- Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029					
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	
									Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
			2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	Laporan	Laporan	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	
			2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	Laporan	Laporan	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	
			2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	58	Unit	
			2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	
			2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	
			2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		
			2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
			2	15	02	2.14	'01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	221	rekomendasi	1326	rekomendasi
			2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	%	-	%	-	%	100	%	100	%	100	%	300	%
			2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen
			2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen
			2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan
			2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	450	%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029				
										2024		2025		2026		2027		2028		2029						
										Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		
			2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		
			2	15	03	2.11	03	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		
			2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan	
			2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
			2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Dibangun							1	Dokumen		1	Lahan Pelabuhan		1	Unit		1	Unit
			2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		Unit		3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	12	Unit	
			2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	12	Unit	
			2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpuan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Tersedia	Unit		Unit		Unit		3	Unit		3	Unit		3	Unit		9	Unit

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029		
									2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target		
									Target		Target		Target		Target		Target		Target				
			2	15	03	2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	%	-	%	-	%	100	%	100	%	100	%	300	%	
			2	15	03	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit	
			2	15	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memiliki Izin	25	%	25	%	50	%	50	%	50	%	50	%	250	%	
			2	15	04	2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
			2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	6	Dokumen
			2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	88	%	88	%	100	%	100	%	100	%	100	%	576	%	
			2	15	05	2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	
			2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen
			2	15	05	2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	6	Kegiatan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029						
										2024		2025		2026		2027		2028		2029			
										Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target	
			2	15	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan
			2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan
			2	15	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen	


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PANGSERANG
BENNY YULIANSI, ATD, M.Si
 NIP. 19670809 199103 1 005

Tabel Kerangka Pendanaan

**KERANGKA PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025 - 2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2	15												
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan tata kelola Perangkat daerah	13.913.147.208	17.295.332.578	20.056.874.990	22.497.874.990	22.577.244.990	23.002.344.990	119.342.819.746	
			2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun								
			2	15	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.846.900	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	755.846.900
			2	15	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
			2	15	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
			2	15	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
			2	15	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
			2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.054.746	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	490.054.746
			2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.743.600	125.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	825.743.600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Keuangan perangkat daerah								
			2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.231.273.000	11.497.746.750	11.497.746.750	11.497.746.750	11.497.746.750	11.497.746.750	67.720.006.750
			2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135.328.200	250.000.000	250.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.685.328.200
			2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
			2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.099.840	10.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	196.099.840
			2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
			2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
			2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	263.996.400	243.709.056	350.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.207.705.456
			2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
			2	15	01	2.04		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
			2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				100.000.000			100.000.000
			2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		200.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.800.000.000
			2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000
			2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	260.000.000
			2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
			2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
			2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	176.961.357	200.000.000	300.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	2.026.961.357
			2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	141.416.541	150.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.591.416.541
			2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000
			2	15	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
			2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.952.412	600.000.000	700.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	5.366.952.412
			2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia							
			2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1.004.760.000					1.004.760.000
			2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
			2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48.772.000	78.728.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.427.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			507.700.000	520.700.000	550.070.000	570.170.000	2.148.640.000
			2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	181.617.300	167.661.792	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.299.279.092
			2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	528.183.296	550.113.188	740.000.000	940.000.000	940.000.000	940.000.000	4.638.296.484
			2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
			2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	211.888.750	167.661.792	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.329.550.542
			2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	255.117.550	300.000.000	607.426.560	807.426.560	807.426.560	807.426.560	3.584.823.790
			2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	659.411.400	700.000.000	1.501.450.840	1.701.450.840	1.701.450.840	1.956.450.840	8.220.214.760
			2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
			2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		59.952.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	459.952.000
			2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.916	500.000.000	1.252.550.840	1.460.550.840	1.460.550.840	1.460.550.840	6.543.687.276

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
										2024	2025	2026	2027	2028	2029		
										Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kabupaten yang nyaman, berbudaya, dan Tangguh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kabupaten yang modern, ramah, dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	Rasio Konektivitas	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	20.306.315.559	38.605.641.068	55.145.717.266	58.552.256.600	62.636.306.429	66.394.484.815	301.640.721.737	
			2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
			2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		450.000.000	-		-	-	450.000.000	
			2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ			300.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000	
			2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		50.000.000	50.000.000	50.000.000	5.000.000	50.000.000	205.000.000	
			2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
			2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			600.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.100.000.000	
			2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4.373.954.900	13.341.081.000	15.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000	80.715.035.900	
			2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			665.080.000	680.080.000	695.080.000	710.080.000	2.750.320.000	
			2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11.143.096.714	15.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000	18.000.000.000	92.143.096.714	
			2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		100.000.000	200.000.000					300.000.000
			2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun			10.000.000.000	10.000.000.000	10.560.324.029	11.174.733.615		41.735.057.644
			2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan			250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000		1.300.000.000
			2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	443.873.700	750.000.000	1.058.450.000	1.158.450.000	1.258.450.000	1.358.450.000		6.027.673.700
			2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
			2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		200.000.000
			2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	158.208.650	300.000.000	450.000.000	400.000.000	550.000.000	650.000.000		2.508.208.650
			2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
			2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia				400.000.000	700.000.000	900.000.000		2.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga penguji yang tersedia				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
			2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	199.291.382	250.000.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	1.699.291.382
			2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	434.934.382	500.000.000	525.000.000	550.000.000	575.000.000	600.000.000	3.184.934.382
			2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
			2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
			2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	302.848.850	600.000.000	700.000.000	725.000.000	750.000.000	800.000.000	3.877.848.850
			2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				120.000.000	120.000.000	120.000.000	360.000.000
			2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					200.000.000		200.000.000
			2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
			2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
			2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	815.000.000	1.495.326.300	1.565.326.300	1.615.326.300	1.665.326.300	1.725.326.300	8.881.631.500
			2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.331.085.349	3.661.300.632	6.187.998.726	6.250.000.000	6.500.000.000	6.750.000.000	30.680.384.707

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
			2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
			2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten							
			2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
			2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000
			2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
			2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	32.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	282.000.000
			2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
			2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
			2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	106.858.650	158.040.000	170.000.000	189.648.000	227.577.000	273.093.000	1.125.216.650
			2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				99.792.000	119.750.000	143.700.000	363.242.000
			2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				418.296.000	501.955.000	602.346.000	1.522.597.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	
										Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				418.296.000	501.955.000	602.346.000	1.522.597.000
			2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	59.402.400	712.577.840	727.577.840	890.722.300	890.722.300	890.722.300	4.171.724.980
			2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	845.221.482	1.053.484.400	1.181.284.400	1.309.084.400	1.436.884.400	1.564.684.400	7.390.643.482
			2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000	300.000.000	300.000.000	900.000.000
			2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.539.100	83.830.896	90.000.000	102.561.600	128.282.400	154.003.200	619.217.196
			2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
			2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
			2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
			2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	1.490.893.464	1.578.859.000	2.498.859.000	3.258.859.000	5.700.339.000	8.655.859.000	23.183.668.464
			2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029	
									2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.358.650	150.000.000	170.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	1.118.358.650
			2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal							
			2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				200.000.000			200.000.000
			2	15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					100.000.000		100.000.000
			2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	418.006.100	428.859.000	628.859.000	628.859.000	628.859.000	628.859.000	3.362.301.100
			2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau							
			2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				100.000.000			100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
										2024	2025	2026	2027	2028	2029		
										Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			2	15	03	2.11	03	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau					100.000.000		100.000.000	
			2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	388.852.314	400.000.000	500.000.000	630.000.000	650.000.000	675.000.000	3.243.852.314	
			2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan, Penerbitan Izin, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal								
			2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				100.000.000	2.501.480.000	5.552.000.000	8.153.480.000	
			2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara			600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.400.000.000	
			2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	555.676.400	600.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	850.000.000	4.105.676.400	
			2	15	03	2.12	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	
			2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
			2	15	03	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2029
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			2	15	05	2.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota							
			2	15	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000



 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 KABUPATEN WAGAY
 BENNY YUMISA, A.T.P., M.Si
 NIP. 19670909 199103 1 005